



BPK Jateng Serahkan Empat LHP pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

Semarang, Kamis (14/01/21) - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Tengah (Jateng) menyerahkan Empat Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Penyerahan LHP dilakukan secara simbolis oleh Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jawa Tengah Ayub Amali kepada Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah Bambang Kusriyanto dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Acara penyerahan ini dihadiri oleh Anggota V BPK RI Bahrullah Akbar, Tortama KN V BPK RI Akhsanul Khaq secara virtual.

Keempat LHP yang diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tersebut adalah:

1. LHP Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Sistem Administrasi Berbasis Elektronik (SPBE) dalam Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan TA 2019 s.d. Semester I 2020 pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Instansi Terkait Lainnya;
2. LHP Kepatuhan atas Penanganan Pandemi Covid-19 Tahun 2020 pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
3. LHP Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Bank pada PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jawa Tengah Tahun Buku 2018 s.d. Triwulan III Tahun 2020;
4. LHP Kepatuhan atas Kegiatan Investasi dan Operasional PT. Sarana Patra Hulu Cepu (SPHC), Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Instansi Terkait Lainnya TA 2017 s.d. Semester I Tahun 2020.

Di awal sambutannya, Anggota V BPK RI Bahrullah Akbar menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan jajaran BUMD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, atas kehadiran dan komitmennya terus mendukung peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, serta telah membantu kelancaran pelaksanaan tugas pemeriksaan oleh BPK Perwakilan Jateng dalam kondisi masa pandemi ini.

Bahrullah Akbar menjelaskan bahwa laporan hasil pemeriksaan antara lain berisi kesimpulan, temuan, dan rekomendasi yang dapat berfungsi untuk sarana komunikasi dengan pihak yang berwenang, menghindari kesalahpahaman atas hasil pemeriksaan, sebagai bahan untuk tindakan perbaikan oleh pihak yang bertanggungjawab, dan memudahkan pemantauan tindaklanjut untuk menentukan tindakan perbaikan yang semestinya dilakukan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, BPK terdapat beberapa permasalahan yang harus segera ditindaklanjuti. Permasalahan tersebut antara lain:

1. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah belum membentuk Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, untuk menyelaraskan penyediaan regulasi, perencanaan, pengembangan dan pelaksanaan SPBE dengan regulasi/kebijakan ditingkat pusat maupun di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
2. Bank Jateng belum sepenuhnya merencanakan penyaluran kredit, belum memenuhi kewajiban sebagai Bank Buku III untuk penyaluran kredit produktif 65%, serta belum sepenuhnya menyediakan dukungan jaringan TI yang memadai dalam kegiatan penyaluran kredit;

3. Penentuan calon penerima bantuan bahan baku untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) tidak sepenuhnya berdasarkan database pelaku usaha yang terdampak pandemi Covid 19;
4. Dividen atas saham treasury kepada PT SPHC tidak sesuai ketentuan, mengakibatkan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai pemegang saham tidak memperoleh hak deviden secara penuh.

Atas permasalahan-permasalahan tersebut, BPK memberikan rekomendasi perbaikan kepada Gubernur Jawa Tengah, Direktur Utama PT BPD Jateng, dan Direktur PT SPHC. Bahrullah Akbar menghimbau agar Gubernur Jawa Tengah beserta para Direktur BUMD segera menindaklanjuti rekomendasi BPK yang dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan ini, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. “BPK sangat mengharapkan peran aktif Inspektoral Provinsi Jawa Tengah dan SPI masing-masing BUMD, untuk mengkoordinasikan pelaksanaan tindak lanjut tersebut sesuai dengan kewenangannya,” ujarnya.

Acara penyerahan juga diikuti oleh Plh. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Prasetyo Aribowo dan Inspektur Provinsi Jawa Tengah Hendri Santosa. Komisaris Utama PT BPD Jateng Edy Chrystanto, Direktur Utama PT BPD Jateng Supriyatno, dan Komisaris sekaligus Plt. Direktur PT SPHC Herru Setiadhie, turut menyaksikan acara penyerahan ini secara virtual dari lokasi masing-masing.

Informasi lebih lanjut:

Siti Rahmawati Arifah, Kepala Subbagian Hubungan Masyarakat

Telp. 024-8660826 Ext. 2013

Fax. 024-8660884

Email : humas.jateng@bpk.go.id